

## **BAB II**

### **MASALAH YANG TERJADI DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DAN PAPUA NUGINI KHUSUSNYA WILAYAH MUARA TAMI DAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA DAN PAPUA NUGINI DALAM MENANGANI MASALAH PERBATASAN**

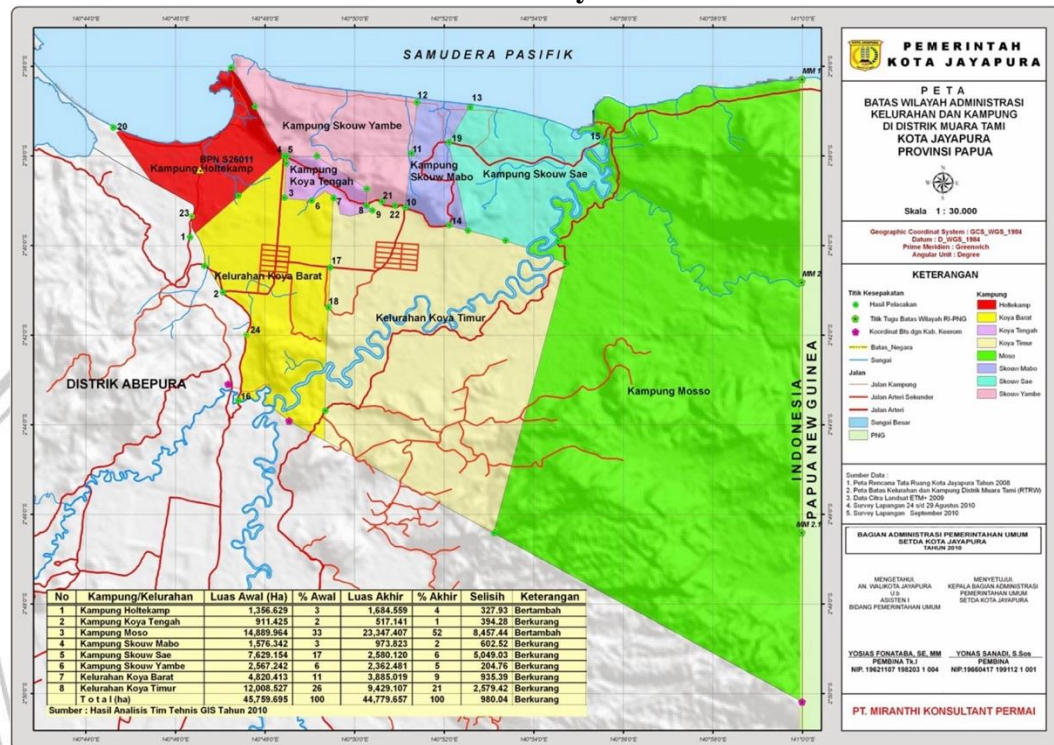
Bab ini membahas dinamika yang terjadi di wilayah Muara Tami yang terjadi yang mengharuskan adanya kerja sama oleh kedua negara dalam penyelesaiannya karena dinamika yang terjadi merupakan masalah transnasional. Sub bab pertama akan membahas penyebaran narkoba di wilayah perbatasan kedua negara. Selanjutnya masalah aktivitas lintas batas illegal, perdagangan lintas batas illegal dan masalah-masalah lainnya. Dan membahas implementasi kerja sama implementasi kerja sama indonesia dan papua nugini dalam menangani masalah perbatasan karena masalah yang terjadi sangat kompleks, mengancam stabilitas negara dan berada di wilayah perbatasan kedua negara maka diperlukan adanya kerja sama untuk penyelesaiannya.

#### **2.1 Geografis Wilayah Muara Tami**

Muara Tami merupakan sebuah distrik di Provinsi Papua, menurut sumber dari website Badan Pusat Statistika Kota Jayapura, Daerah Muara Tami memiliki luas wilayah 626,7 km<sup>2</sup> yang mana luas tersebut terdiri dari lima kampung yaitu

Holtekamp, Skouw Sae, Skouw Yambe, Skouw Mabo, Koya Tengah dan dua kelurahan yaitu Koya Barat dan Koya Timur.<sup>32</sup>

**Gambar 2. 1 Peta Wilayah Muara Tami**



Sumber : Website Pemerintah Kota Jayapura Kelurahan Koya Barat  
<https://pemerintahkelurahankoyabarot.blogspot.com/2012/01/peta.html>

Kondisi geografis di Distrik Muara Tami memiliki lahan datar yang cukup besar dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya di Kota Jayapura. Distrik Muara Tami berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea di sebelah Timur, Distrik Abepura di sebelah Barat, Kabupaten Keerom di sebelah selatan, dan Samudera Pasifik di sebelah utara. Distrik Muara Tami terdiri dari 3 kelurahan dan

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik and Kota Jayapura, “Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kota Jayapura Tahun 2024 (Km2),” Badan Pusat Statistik Kota Jayapura, 2024, <https://jayapurakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjczIzE=/luas-daerah-menurut-kecamatan-di-kota-jayapura-tahun-2024-km2-.html>.

5 kampung dengan luas wilayah mencapai 45370,14 Ha, yang merupakan distrik terluas di Kota Jayapura dan 75% merupakan hutan yang ada di wilayah tersebut.<sup>33</sup>

Berbagai persoalan yang muncul di kawasan perbatasan Muara Tami tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Kepala Badan Perbatasan mengungkapkan bahwa maraknya tindak kejahatan di kawasan tersebut, khususnya peredaran komoditas ilegal dan kasus pencurian, berkaitan erat dengan banyaknya jalur-jalur tidak resmi yang menembus kawasan hutan. Di sisi lain, pengawasan yang belum optimal di jalur laut juga menjadi celah bagi masuknya narkoba dan senjata tajam ke wilayah perbatasan.<sup>34</sup>

## **2.2 Penyelundupan dan Penyebaran Narkoba di Wilayah Muara Tami**

Peredaran barang terlarang, terutama narkoba dan senjata tajam, menjadi isu utama yang mendapat perhatian serius di kawasan perbatasan Skow-Wutung. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini agar penanganannya dapat dilakukan secara efektif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Perbatasan yang membenarkan bahwa peredaran barang-barang ilegal, termasuk senjata dan ganja, masih berlangsung di kawasan perbatasan tersebut.<sup>35</sup>

Wilayah Muara Tami, Kota Jayapura, merupakan salah satu titik paling rawan peredaran narkoba di Papua. Hal ini disebabkan letaknya yang berbatasan

---

<sup>33</sup> Milano Khemal Sawo, Octavianus H.A. Rogi, and Ricky S. M. Lakat, "Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami," *Jurnal Spasial Vol. 8 No. 3, 2021 ISSN 2442-3262* 8, no. 3 (2021): 311–25, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/view/35842/33461>.

<sup>34</sup> Pakasi, "Identifikasi Potensi Sumber Konflik Daerah Perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea (Ri-Png) (Study Kasus Di Wilayah Perbatasan Skow-Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua)."

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 117.

langsung dengan Papua Nugini (PNG) melalui PLBN Skouw. Studi akademik menunjukkan bahwa sejak 2014 hingga 2019, terjadi berulang kali penyelundupan ganja melalui jalur ini. Beberapa kasus tercatat, antara lain: 7,2 kg ganja disita pada 2014, 4 kg pada 2015, 1 kg pada 2016, 500 gram pada 2017, 3 kg pada 2018, dan 1 kg pada 2019. Pola kasus ini memperlihatkan kesinambungan masuknya ganja dari PNG ke Muara Tami, meskipun besaran barang bukti bervariasi setiap tahunnya.<sup>36</sup>

Penyelundupan ganja di Muara Tami tidak hanya dilakukan oleh warga PNG, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal. Faktor kedekatan kekerabatan antara warga Skouw (Indonesia) dan Wutung (PNG) membuat mobilitas lintas batas relatif cair. Situasi ini sering dimanfaatkan jaringan narkoba untuk mengalirkan ganja ke Jayapura. Bahkan, warga lokal seperti dari Koya Timur maupun Mosso tercatat beberapa kali menjadi kurir atau pengedar dalam kasus ganja di perbatasan.<sup>37</sup>

**Tabel 2. 1 Penangkapan Peredaran Narkoba Di Wilayah Muara Tami**

No.	Tanggal	Lokasi	Barang Bukti	Sumber
1	21 Oktober 2020	Koya, Distrik Muara Tami	13 paket ganja	<a href="http://papua.antaraneews.com">papua.antaraneews.com</a>

<sup>36</sup> Maya, Dermawan, and Susanti, "The Integrated Prevention Model for Marijuana Smuggling in Land Border Region of Indonesia-Papua Nugini (Case: Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province)."

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 657.

2	2 November 2020	Jalan Trans Abepura - Keerom Distrik Muara Tami	6 paket ganja ukurang sedang	<a href="http://WWW.BERITAPAPUA.CO">WWW.BERITAPAPUA.CO</a>
3	28 Maret 2021	Jalan Poros Koya Tengah	130 gram ganja (Satgas 131)	<a href="http://www.satukanindonesia.com">www.satukanindonesia.com</a>
4	31 Oktober 2021	Jalan Trans Muara Tami	6 paket ganja (Rp1 Juta/paket)	<a href="http://polresjayapurakota.net">polresjayapurakota.net</a>
5	24 Juli 2021	Expo Waena, Distrik Heram, Jayapura, Papua.	24 paket ganja	<a href="http://ANTARANEWS.COM">ANTARANEWS.COM</a>
6	9 Januari 2022	Skouw Sae, Muara Tami	1,5 kg ganja	<a href="http://ANTARANEWS.COM">ANTARANEWS.COM</a>
7	13 Desember 2022	Perbatasan Skouw	1,02 kg ganja (24 paket)	<a href="http://DETIK.COM">DETIK.COM</a>

8	5 Oktober 2023	Pasar Batas Skouw, Kampung Mosso	21 paket ganja (karung)	( <a href="#">ANTARA News</a> )
9	3 Oktober 2023	Perbatasan RI- PNG	825 g ganja	( <a href="#">ANTARA News</a> )
10	2 Juli 2024	PLBN Skouw	68,13 gram ganja	( <a href="#">bnpp.go.id</a> )
11	13 Desember 2024	Kampung Pitewi, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua.	2 Kg ganja	( <a href="#">Infopublik.go.id</a> )
12	9 Februari 2025	Muara Tami	9 paket ganja (288,72 g)	( <a href="#">Kilas Papua</a> )

13	5 Februari 2025	Depan RS Kemenkes Uncen	14 paket ganja (420,6 g)	(Kilas Papua)
14	10 Februari 2025	Hanurata, Holtekamp	22 paket ganja (268,7 g)	(Kilas Papua)
15	14 Februari 2025	Skouw perbatasan	60 paket ganja (1 800,79 g)	(Kilas Papua)
16	19 Februari 2025	Terminal 12, Holtekamp	12 paket ganja (257,51 g)	(Kilas Papua)

Tabel dibuat oleh penulis menggunakan berbagai sumber

Pada tabel 2.1 merupakan data penangkapan peredaran peredaran narkoba diwilayah Muara Tami, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini masih ada penyebaran narkoba dari tahun ke tahun.

Kasus penyelundupan dan peredaran narkoba dari Papua Nugini menuju Jayapura umumnya dilakukan melalui jalur laut maupun darat. Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan geografis Provinsi Papua dengan Kota Vanimo di PNG. Transaksi narkotika ilegal tersebut biasanya dijalankan oleh kelompok atau jaringan warga

yang memiliki hubungan kekerabatan lintas negara, sehingga memudahkan terjadinya praktik barter di perbatasan menggunakan speedboat.<sup>38</sup>

Arus masuk barang terlarang tersebut pada umumnya memanfaatkan jalur laut dengan menggunakan speedboat sebagai sarana transportasi. Cara ini dinilai menguntungkan bagi para pelaku karena pengawasan aparat keamanan di jalur laut relatif lebih sulit dilakukan. Sejumlah lokasi yang rawan menjadi titik transaksi telah berhasil diidentifikasi, di antaranya kawasan Hamadi, Dok IX, Dok VIII, Pasir VI, Kayu Pulo, dan Kampung Argapura Laut yang dikenal sebagai Kampung Vietnam. Selain jalur laut, para penyelundup juga memanfaatkan jalur darat melalui jalan-jalan setapak di tengah hutan yang belum terjangkau serta pos keamanan dengan pengawasan minim. Jalur ini memungkinkan ganja masuk ke Indonesia melalui Kabupaten Keerom, khususnya Desa Mosso, Distrik Waris, dan Distrik Senggi. Adapun ganja tersebut umumnya bersumber dari beberapa desa di Provinsi Sandaun, antara lain Warapu, Marobe, Lae District, dan Kota Vanimo.<sup>39</sup>

### **2.3 Aktifitas Lintas Batas Ilegal dan Jalan Tikus Sebagai Akses Migrasi Oknum Kedua Negara**

Praktik perlintasan batas secara ilegal di kawasan Skow-Wutung merupakan salah satu permasalahan yang cukup mencolok. Fenomena ini termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang kerap dijumpai di wilayah perbatasan antarnegara. Kedekatan emosional serta berbagai kesamaan yang dimiliki warga di

---

<sup>38</sup> Meyland Wambrau and Mariana E Buiney, "Cooperation the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in the Papua Region and the National Narcotics Agency (BNN) in Handling Drugs Smuggling at the RI (Skouw)-PNG Border (Vanimo)," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 7 (2025): 3183–98, <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i7.337>.

<sup>39</sup> Sinaga, "Kejahatan Transnasional Melalui Perdagangan Barter Narkoba Di Kawasan Perbatasan Ri – Papua New Guinea."

kedua sisi perbatasan, seperti kemiripan budaya, kesamaan ras, hubungan kekerabatan, bahkan marga yang sama, mendorong mereka untuk saling berinteraksi secara intensif dan berkunjung satu sama lain tanpa selalu mengikuti prosedur resmi perlintasan batas yang berlaku.<sup>40</sup>

Umumnya, mereka yang terlibat dalam praktik perlintasan batas secara ilegal berkaitan dengan tindak pelanggaran hukum, seperti peredaran narkoba dan senjata tajam, atau individu-individu yang melarikan diri akibat terlibat dalam kasus kriminal maupun masalah politik. Maraknya kejahatan di wilayah perbatasan, termasuk peredaran barang ilegal dan pencurian, didorong oleh tersedianya banyak jalur alternatif melalui kawasan hutan yang sulit dipantau. Di samping itu, lemahnya pengawasan di jalur laut juga menjadi faktor yang memperburuk peredaran narkoba dan senjata tajam di kawasan tersebut.<sup>41</sup>

Masalah ini dibenarkan oleh petugas Imigrasi PLBN Skouw, menurut data wawancara melalui virtual online oleh penulis dengan Bapak Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw.

"Jadi memang yang sering melewati itu masyarakat yang tidak punya dokumen. Tapi itu masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, bukan yang masyarakat yang mempunyai seperti paspor, pas lintas batas. Jadi ada beberapa mungkin yang kami tolak untuk lewat jalur resmi akhirnya mengambil alternatif untuk melewati jalur tersebut."

Meskipun pemerintah sudah memberlakukan PLBN Skouw sebagai sarana imigrasi yang resmi tetapi jalan tikus ini sering digunakan oleh penduduk lokal

---

<sup>40</sup> Sinaga.

<sup>41</sup> Pakasi, "Identifikasi Potensi Sumber Konflik Daerah Perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea (Ri-Png) (Study Kasus Di Wilayah Perbatasan Skow-Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua)."

yang memiliki ikatan emosional, budaya, dan keluarga lintas batas, sehingga mereka melintas tanpa dokumen resmi. Namun, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan aktivitas kriminal.<sup>42</sup> Adapun pengaruh masyarakat atau oknum yang melakukan lintas batas ilegal adalah kedua WNI dan WNA menganggap bahwa mereka memiliki kesamaan etnis, budaya, dan hubungan kekerabatan di kedua sisi perbatasan, yang membuat masyarakat merasa lintasan tradisional sebagai hal yang wajar, kemudian kondisi geografis yang berat dan sulit diawasi seperti hutan lebat, pegunungan, rawa, hingga jalur laut terbuka, memberikan peluang terciptanya akses-akses tidak resmi dan keterbatasan infrastruktur dan aparat keamanan yang minimnya pos pengawasan dan jarak antar marka batas yang sangat jauh hingga puluhan kilometer menjadikan pengendalian lintas batas oleh petugas keamanan dan petugas imigrasi sangat lemah.<sup>43</sup>

#### **2.4 Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal Lintas Batas**

Dalam penyebaran penyelundupan dan perdagangan lintas batas komoditas yang diselundupkan di wilayah Muara Tami tidak hanya narkoba jenis ganja saja, melainkan komoditas yang juga diselundupkan antara lain adalah perdagangan miras, vanili, minyak tanah yang di beli di Jayapura dan diselundupkan ke Vanimo melalui jalur laut menggunakan speed boat dan jalur-jalur tidak resmi di hutan sekitar PLBN Skouw.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Usman Pakasi, "Conflict in the Border Region Between Indonesia and Papua New Guinea" 84, no. Iconeg 2016 (2017): 166–69, <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.39>.

<sup>43</sup> Harry Purwanto and Gede Dewa Sudika Mangku, "Border Security In Indonesia And Papua New Guinea," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 12, no. 4 (2017): 92–94, <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p66801/mobile/ch14.html>.

<sup>44</sup> Fachrudin Fiqri Affandy, "Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea Di Kota Jayapura," 2017. hal 160

Adapun faktor pendorong yang menjadikan masyarakat di wilayah Muara Tami perbatasan Indoonesia dan Papua Nugini melakukan penyelundupan adalah masalah geografis yang berdekatan seperti yang sudah dijelaskan di sub bab 2.1 Geografis Muara Tami, selain itu adanya faktor transaksi ekonomi di wilayah perbatasan yaitu untuk mencegah bea masuk dan keluar sehingga dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan dan perdagangan illegal lintas batas.<sup>45</sup>

Dalam praktiknya perdagangan lintas batas dan penyelundupan barang terjadi karena adanya permintaan pasar yang tinggi di Vanimo sehingga penyelundupan dari Jayapura sering terjadi seperti bahan-bahan sembako untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti mie instan, minyak goreng, sabun dan lainnya. Alasan lain juga harga sembako di Indonesia cenderung murah dan mudah ditemukan di Jayapura sementara di Papua Nugini stok terbatas dan harga jauh lebih tinggi.<sup>46</sup>

## **2.5 Kelompok Separatis**

Kelompok separatis OPM sejak 1963 berupaya memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Posisi mereka yang berada di sekitar perbatasan Indonesia–Papua Nugini membuat OPM mudah bergerak keluar masuk wilayah, terutama ketika berusaha menghindari kejaran militer Indonesia. Muara Tami sebagai salah satu pintu resmi dan jalur tradisional lintas batas, kerap dijadikan rute keluar-masuk karena kedekatannya dengan Vanimo di PNG. Keberadaan OPM di perbatasan inilah yang menimbulkan ketegangan bilateral, sebab Indonesia kerap

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 216.

<sup>46</sup> John Conroy, “Cross-Border Trade: Indonesia and PNG,” *DevpolicyBlog*, 2020, <https://devpolicy.org/crossborder-trade-indonesia-and-png-20201008/>.

menuding PNG memberikan ruang bagi anggota OPM, termasuk dalam bentuk pengungsian maupun simpati etnis Melanesia di PNG terhadap perjuangan Papua Barat.<sup>47</sup>

Kampung Mosso di wilayah Muara Tami sebelumnya dikenal sebagai salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat berlindung bagi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kondisi alam Mosso yang rimbun dengan pepohonan lebat serta posisinya yang tepat berada di tapal batas negara, diduga kuat memudahkan anggota OPM untuk keluar masuk antara Indonesia dan Papua Nugini tanpa terdeteksi. Meski keberadaan OPM kini tidak sebesar sebelumnya, namun kehadiran kelompok yang bercita-cita memisahkan Papua dari NKRI ini masih menimbulkan keresahan di kalangan warga perbatasan. Setiap kali terjadi aksi unjuk rasa, baik oleh warga maupun kalangan mahasiswa, situasi itu kerap dikaitkan dengan gerakan OPM. Akibatnya, rasa trauma kolektif terhadap konflik masa lalu tidak hanya dirasakan oleh warga non-Papua, tetapi juga oleh Orang Asli Papua (OAP) sendiri.<sup>48</sup>

Keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan setelah aparat TNI berhasil menangkap salah satu tokoh penting OPM, Yusak Pakage, di perbatasan Indonesia–Papua Nugini pada Juni 2023. Penangkapan ini menunjukkan bahwa jalur perbatasan, termasuk kawasan Muara Tami dan Skouw, kerap dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk

---

<sup>47</sup> Muhammad Fadhilah, “Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) Dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji Dan Papua Nugini,” *Journal Indonesian Perspective* 4, no. 1 (2019): 59–81.

<sup>48</sup> Syuhudi, “Dinamika Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Indonesia - Papua Nugini Di Muara Tami Jayapura.” hal 260

melintas dan menjalankan aktivitasnya. Posisi geografis perbatasan yang terbuka dan sulit diawasi sepenuhnya menjadikan daerah tersebut rawan digunakan sebagai ruang persembunyian maupun jalur keluar-masuk ke Papua Nugini. Dari perspektif keamanan, kasus ini menegaskan bahwa meskipun Muara Tami lebih sering dikenal sebagai pusat perdagangan lintas batas, potensi penyusupan dan aktivitas politik separatis tetap ada. Oleh sebab itu, penguatan fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw tidak hanya diperlukan untuk mendorong perdagangan legal, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan perbatasan oleh kelompok bersenjata dan simpatisannya.<sup>49</sup>

"Kalau saya hanya menjawab mungkin yang terkait imigrasi ya. Kalau memang dibilang dari apa? Jalur-jalur ilegal yang sering dilewati oleh pelintas batas, khususnya tradisional, memang di wilayah PLBN Skouw itu kan ada beberapa jalur yang ilegal yang sering dilewati oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Namun, dari pantauan imigrasi, memang ada beberapa yang karena kita lihat dari letak dari PLBN ini kan di dekat pagar itu kan imigrasi itu kan sebenarnya kalau ditarik dari aturan keimigrasian, imigrasi itu bukan penjaga perbatasan, tapi dia penjaga pintu gerbang, eh penjaga pintu gerbang Indonesia. Artinya, imigrasi itu hanya di titik-titik yang sudah ditentukan, artinya titik yang resmi. Terus kalau terkait untuk jalur-jalur ilegal itu di bawah pengawasan Pamtas dan akan berkomunikasi dengan instansi terkait. Nah, di PLBN sendiri itu memang ada beberapa jalur yang sering dilewati. Terkait yang dibilang untuk KKB, saya juga nggak bisa jawab karena itu kan ranahnya keamanan. Jadi yang saya bisa jawab ya itu aja yang biasa dilewati pelintas ilegal, khususnya masyarakat asli yang tinggal di

---

<sup>49</sup> CNN Admin, "TNI Tangkap Tokoh OPM Yusak Package Di Perbatasan Papua Nugini," CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230609201002-12-959974/tni-tangkap-tokoh-opm-yusak-package-di-perbatasan-papua-nugini>.

daerah perbatasan. Memang ada beberapa yang sering dilewati."

Menurut data wawancara melalui virtual *online* oleh penulis dengan Bapak Marcelinus Andi Tormapau selaku penanggung jawab tempat pemeriksaan Imigrasi PLBN Skouw, beliau membenarkan adanya masalah-masalah yang terjadi diwilayah perbatasan Muara Tami yang telah dipaparkan oleh penulis diatas seperti adanya beberapa jalur illegal dan pelintas illegal. Beberapa masalah perbatasan diatas ini menjadi landasan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menjalin hubungan bilateral dalam bidang keamanan perbatasan diwilayah Muara Tami. Sehingga kedua negara menjalin beberapa kerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut.

#### ***2.6 Treaty of Mutual Respect, Cooperation, and Friendship Between Indonesia and Papua New Guinea***

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini yang dikenal dengan nama *Treaty of Mutual Respect, Cooperation, and Friendship* merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah hubungan luar negeri kedua negara. Ditandatangani di Port Moresby pada 27 Oktober 1986 dan mulai berlaku sejak diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, perjanjian ini bertujuan menciptakan hubungan jangka panjang yang damai dan saling menguntungkan, khususnya dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut menjadi sangat relevan karena wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini kerap menjadi titik rawan konflik, penyelundupan, dan

perlintasan ilegal akibat kurangnya pengawasan efektif dan tantangan geografis yang ekstrem.<sup>50</sup>

Isi dari perjanjian ini menekankan prinsip-prinsip utama dalam hubungan internasional modern: saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negeri, menyelesaikan sengketa secara damai, serta tidak menggunakan atau mengancam dengan kekerasan terhadap satu sama lain. Perjanjian ini juga menegaskan bahwa kedua negara tidak akan menggunakan wilayahnya untuk melakukan tindakan subversif terhadap pihak lain, dan tidak akan mengizinkan kekuatan asing untuk menjadikan wilayahnya sebagai basis aksi permusuhan terhadap negara pihak lainnya. Ketentuan tersebut mencerminkan kekhawatiran bersama kedua negara pada masa itu mengenai kemungkinan infiltrasi kelompok separatis dan aktivitas bersenjata lintas batas yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Sebagaimana dicatat oleh R.J. May dalam analisisnya terhadap hubungan Indonesia–Papua Nugini, perjanjian ini muncul sebagai respons terhadap ketegangan yang meningkat pada awal 1980-an, terutama akibat pergerakan kelompok separatis Papua Merdeka (OPM) yang kerap melintas ke wilayah Papua Nugini untuk menghindari aparat keamanan Indonesia. Dalam kondisi demikian, perjanjian ini tidak hanya menjadi simbol normalisasi hubungan, tetapi juga merupakan komitmen hukum yang nyata bagi kedua negara untuk menangani permasalahan perbatasan secara kooperatif dan damai. Papua Nugini sendiri,

---

<sup>50</sup> Joy Kusnadi, “Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pengesahan ‘Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea,’” 1950.

sebagai negara tetangga dengan sumber daya terbatas, berkepentingan untuk tidak terseret dalam konflik politik internal Indonesia, namun juga harus menjaga kredibilitas kedaulatannya di mata warganya sendiri.<sup>51</sup>

Implementasi perjanjian ini membawa sejumlah perkembangan positif dalam hubungan bilateral. Pemerintah kedua negara mulai memperkuat kerja sama dalam bidang pengawasan perbatasan, termasuk patroli bersama, pembentukan forum bilateral lintas batas, serta penetapan Pos Lintas Batas Terpadu (PLBT) di titik-titik strategis seperti Skouw (Indonesia) dan Wutung (Papua Nugini). Di samping itu, kedua negara juga bersepakat untuk melakukan pertukaran informasi intelijen, khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta kegiatan ilegal lainnya yang marak terjadi di daerah perbatasan. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan perjanjian ini menghadapi tantangan besar. Faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya aparat, serta intensitas pergerakan masyarakat adat yang secara historis memiliki hubungan kekerabatan lintas batas membuat pengawasan sulit dijalankan secara menyeluruh. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa aktivitas ekonomi informal seperti barter hasil bumi atau perdagangan kecil-kecilan sering disusupi oleh kegiatan ilegal yang lebih serius. Dalam konteks ini, perjanjian 1986 belum mampu secara penuh menjawab dinamika lapangan yang sangat cepat berubah, apalagi di era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> R. J. May, “‘Mutual Respect, Friendship and Co-Operation?’ The Indonesia-Papua New Guinea Border and Its Effects on Relations between Papua New Guinea and Indonesia,” *Critical Asian Studies* 19, no. 4 (1987): 44–52, <https://doi.org/10.1080/14672715.1987.10409793>.

<sup>52</sup> Pugu and Yani, “Human Security For Border Society: A Case Study At Waris Community At The Borders Of Ri-PNG.”

Lebih lanjut, kritik terhadap implementasi Treaty juga datang dari kalangan akademisi dan praktisi kebijakan luar negeri, yang menilai bahwa perjanjian ini terlalu normatif dan belum memiliki mekanisme evaluasi kinerja yang konkret. Misalnya, tidak adanya ketentuan sanksi atau tahapan penyelesaian apabila salah satu pihak gagal melaksanakan komitmennya. Meski forum konsultatif dibentuk, pelaksanaannya sangat tergantung pada kemauan politik dan kapasitas diplomasi masing-masing pihak. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi perjanjian ini sangat bergantung pada kontinuitas dialog bilateral, keterbukaan informasi, serta integrasi kebijakan keamanan perbatasan ke dalam kerangka pembangunan regional yang lebih luas.<sup>53</sup>

Namun demikian, harus diakui bahwa *Treaty of Mutual Respect* ini tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Keberadaannya menunjukkan bahwa kedua negara memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur diplomatik dan kerja sama, bukan konfrontasi. Di tengah kompleksitas persoalan seperti peredaran narkoba, aktivitas separatis, dan tantangan sosial ekonomi masyarakat perbatasan, perjanjian ini menyediakan ruang dialog yang bisa terus diperbarui dan diperluas cakupannya. Langkah ke depan yang dapat diambil termasuk revisi atau adendum terhadap perjanjian agar mencakup aspek-aspek teknis baru, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi bersama berbasis data dan teknologi informasi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Pugu and Yani.

<sup>54</sup> Pugu and Yani.

## 2.7 Implementasi Joint Border Commite

Joint Border Committee (JBC) pertama kali didirikan pada 1985 sebagai wadah pertemuan antarnegara guna mengoordinasikan berbagai pengaturan di wilayah perbatasan. Komite ini beranggotakan pejabat senior dari masing-masing pihak, yang bertugas memberikan masukan serta rekomendasi kepada pemerintah masing-masing terkait berbagai hal, mekanisme, dan ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, sekaligus mendorong pengembangan dan peninjauan kerja sama di bidang perbatasan.<sup>55</sup>

Komite ini dibentuk untuk menangani berbagai persoalan yang mencakup sengketa kawasan perbatasan, pelanggaran lalu lintas batas, kegiatan ekonomi antarnegara, kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan di wilayah perbatasan, termasuk aspek kerja sama bilateral kedua negara. Pertemuan komite diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun, dengan kemungkinan penambahan pertemuan sesuai kebutuhan atas permintaan salah satu pihak. Lokasi pertemuan ditetapkan secara bergantian di antara kedua negara, dengan perwakilan setingkat menteri terkait yang hadir dalam forum komite tersebut.<sup>56</sup>

Adapun pelaksanaan forum Joint Border Commite di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dari tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Kusnadi, "Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pengesahan 'Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea.'"

<sup>56</sup> Muh. Ardiansyah Putra and Zaky Ismail, "Kepentingan Indonesia Terhadap Papua New Melalui Joint Border Committee (JBC) Di Kawasan Perbatasan Merauke Pada 2018 – 2020," *Siyar Journal*, 2022, <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/siyar/article/view/256>.

Pada pertemuan yang diselenggarakan ditanggal 15-16 Desember 2022, Direktorat Jenderal pp Administrasi Kewilayahan berhasil menggelar Sidang ke-36 *Joint Border Committee* (JBC) yang berlangsung selama dua hari di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta. Indonesia dan Papua Nugini melakukan forum persidangan dengan tujuan untuk mempererat hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, khususnya di daerah perbatasan, dan membahas pending issues terkait dengan aktivitas lintas-batas di kawasan perbatasan.<sup>57</sup>

Delegasi Indonesia dalam Persidangan ke-36 *Joint Border Committee* (JBC) dipimpin oleh Dr. Safrizal ZA, M.Si., selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sekaligus *chairman*. Keanggotaan delegasi mencakup perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri sebagai *Co-Chair*, Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Direktorat Topografi TNI AD, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Perdagangan Bilateral Kementerian Perdagangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Staf Operasi Markas Besar TNI. Selain itu, hadir pula perwakilan pemerintah daerah, meliputi Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Internasional Provinsi Papua, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Jayapura, BPPD Merauke, dan BPPD Keerom.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, "Tertunda 3 Tahun, Perundingan Kerjasama Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini Kembali Digelar," Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/tertunda-3-tahun-perundingan-kerjasama-perbatasan-darat-indonesiapapua-nugini-kembali-digelar#:~:text=Jakarta-Direktorat Jenderal Bina Adminiatrasi Kewilayahan,Persidangan Ke-36 Joint Border Committ>.

<sup>58</sup> Kewilayahan.

Safrizal menyampaikan bahwa persidangan kali ini bersifat strategis karena membahas sekaligus menyepakati sejumlah *pending issues* yang selama ini belum terselesaikan. Pertemuan ini juga menjadi istimewa mengingat dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah membaiknya situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Delegasi Papua Nugini dipimpin oleh Ms. Magdalene Moi-He, *Acting Deputy Secretary for Policy* pada *Department of Foreign Affairs*, yang didampingi pejabat dari berbagai instansi, termasuk *Department of Foreign Affairs*, *Department of Provincial & Local Level Government Affairs*, *Department of Defense*, PNG Defense, PNG Customs, *Department of Land and Physical Planning*, serta *Road Transport Authority*.<sup>59</sup>

Agenda pembahasan dalam forum ini mencakup beberapa isu penting, seperti *review* terhadap *Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossing* 1993 tindak lanjut atas *MoU on Land Border Transportation* dan *MoU Customs Arrangement*, serta pembahasan mekanisme kartu lintas batas untuk masyarakat di wilayah perbatasan melalui *Border Pass*. Selain itu, dibahas pula perkembangan terbaru terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yang dinilai berimplikasi terhadap tata kelola perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini. Secara keseluruhan, pelaksanaan Persidangan ke-36 JBC RI-PNG dinilai berjalan efektif, dengan tercapainya tujuan bersama dan terselesaikannya sejumlah *pending issues* terkait aktivitas perbatasan kedua negara. Kesepakatan yang diperoleh dituangkan dalam *Record of Discussion*, yang selanjutnya akan

---

<sup>59</sup> Kewilayahan.

ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor di masing-masing kementerian/lembaga pada kedua negara.<sup>60</sup>

Pada pertemuan yang diselenggarakan pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berhasil menggelar Sidang ke-37 *Joint Border Committee* (JBC) di Port Moresby, Papua Nugini. Dalam forum tersebut Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dalam arahannya mengenai pelanggaran wilayah di kawasan perbatasan, menekankan pentingnya sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat terkait informasi batas wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini. Amran menyampaikan bahwa pada tahun 2025 akan dilaksanakan program densifikasi pilar di daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran batas.<sup>61</sup>

Kerja sama perbatasan negara antara Indonesia dan Papua Nugini melalui forum *Joint Border Committee* (JBC) dinilai memiliki peran strategis, khususnya dalam konteks diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Amran menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah untuk memberikan kontribusi terbaik dalam memajukan diplomasi serta mewujudkan kerja sama perbatasan yang harmonis dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Lebih lanjut, arah kebijakan ini selaras dengan politik luar negeri Indonesia yang mengusung konsep *Pacific Elevation*. Papua Nugini, sebagai salah satu negara besar di kawasan Samudra Pasifik dan berbatasan

---

<sup>60</sup> Kewilayahan.

<sup>61</sup> Jenderal Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan, “Ditjen Bina Adwil Kokohkan Kerjasama Perbatasan RI – PNG Tahun 2024,” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, 2024, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/ditjen-bina-adwil-kokohkan-kerjasama-perbatasan-ri--png-tahun-2024>.

langsung dengan Indonesia, memiliki posisi strategis yang signifikan bagi kepentingan nasional.<sup>62</sup>

Rapat tersebut dihadiri secara luring oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Mabes TNI, serta Pemerintah Provinsi Papua. Sementara itu, perwakilan yang hadir secara daring meliputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kedutaan Besar RI di Port Moresby, Konsulat RI di Vanimo, dan BPPD Merauke.<sup>63</sup>

Pada pertemuan yang diselenggarakan ditanggal 18-20 Desember 2024, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berhasil menggelar Sidang ke-38 *Joint Border Committee* (JBC). Dalam pertemuan ini keduanya membahas kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini dalam menyelesaikan berbagai isu yang muncul di kawasan perbatasan, serta mendorong langkah-langkah penyelesaiannya. Forum ini juga memaparkan laporan hasil pembahasan dari sub-sub komite JBC yang telah melaksanakan pertemuan sebelumnya, di antaranya *Border Liaison Meeting*, *Joint Sub-Committee on Security Matters relating to Border Areas*, serta *Joint Technical Sub-Committee on Survey and Demarcation of the Boundary and Mapping of the Border Areas*.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Bina Administrasi Kewilayahan.

<sup>63</sup> Bina Administrasi Kewilayahan.

<sup>64</sup> Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, "Sidang JBC Ke-38 Jadi Upaya Bersama RI-PNG Untuk Kemajuan Kawasan Perbatasan," Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, 2024,

Kegiatan tersebut turut melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam sambutannya, Amran menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan RI–PNG memerlukan *mutual understanding* atau kesepahaman bersama agar setiap kebijakan strategis mampu merepresentasikan kepentingan kedua negara. Ia juga menyatakan bahwa melalui kerangka kerja *Joint Border Committee*, diharapkan tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan keamanan di wilayah perbatasan bersama. Selain itu, kedua negara membahas usulan *review* terhadap *Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossing* 1993 yang mengatur aktivitas lintas batas tradisional. Perjanjian ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perbatasan saat ini, sehingga diperlukan pembaruan.<sup>65</sup>

Pembahasan juga mencakup usulan *review* terhadap *Basic Agreement on Border Arrangements* 2013, sebuah perjanjian pengaturan perbatasan yang telah diratifikasi oleh kedua belah pihak. Beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang belum terselesaikan turut menjadi fokus sidang, antara lain tindak lanjut implementasi *MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches* yang telah ditandatangani pada 15 Juli 2024 oleh Menteri Perhubungan RI dan Menteri Transportasi Papua Nugini, serta pembahasan *MoU on Densification of Boundary Pillars* di wilayah perbatasan RI–PNG. Isu lainnya yang juga menjadi perhatian bersama meliputi aktivitas ilegal di laut teritorial kedua negara, berbagai insiden di wilayah perbatasan, serta rencana reaktivasi *Joint Sub-Committee on*

---

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/sidang-jbc-ke38-jadi-upaya-bersama-ripng-untuk-kemajuan-kawasan-perbatasan>.

<sup>65</sup> Bina Administrasi Kewilayahan.

*Trade and Investment*. Seluruh agenda tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan kawasan perbatasan kedua negara secara komprehensif.<sup>66</sup>

**Gambar 2. 2 Rapat Forum Joint Border Commite**



Sumber foto : Webpage Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

## **2.8 Implementasi Border Liaison Meeting**

Border Liaison Meeting (BLM) merupakan forum kerja sama teknis yang setara dengan tingkat pemerintah provinsi antara kedua negara. BLM diselenggarakan sebagai pertemuan rutin antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Papua Nugini, dengan tujuan menangani isu-isu pembangunan serta menyelesaikan berbagai masalah yang tumbuh dan berkembang di kawasan

---

<sup>66</sup> Bina Administrasi Kewilayahan.

perbatasan. Pelaksanaan forum ini yang bersifat tahunan memberikan peluang untuk terus mempererat hubungan kedua negara secara berkelanjutan.<sup>67</sup>

Pada 2012, Indonesia dan Papua Nugini bersama-sama menyelenggarakan forum BLM ke-9 yang berlangsung di Port Moresby, Papua Nugini, tepatnya pada 8-9 Oktober 2012. Sejumlah topik strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mencakup pembersihan pilar-pilar perbatasan, penanganan keberadaan warga PNG yang bermukim di wilayah Indonesia khususnya di Baidup (Kabupaten Merauke) dan Yabanda (Kabupaten Keerom), serta peninjauan atas *Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossings*. Forum turut membahas pemantauan aktivitas di pasar perbatasan Skouw, renovasi pagar perbatasan Skouw-Wutung, serta pembangunan pos lintas batas di Yetti dan Pund (Kabupaten Keerom), maupun Mandekman, Kweel, dan Sota (Kabupaten Merauke).<sup>68</sup>

Pertemuan juga membahas operasionalisasi kantor pos perbatasan di Sota, pembangunan pos lintas batas laut di Hamadi (Kota Jayapura), serta penyusunan format baru bagi lintasan batas tradisional. Pengawasan pergerakan kapal motor di wilayah perairan perbatasan dan penanganan nelayan Indonesia maupun PNG yang secara tidak sengaja melampaui garis batas laut turut menjadi agenda penting. Pertukaran informasi antarnegara berlangsung di berbagai bidang, meliputi kesehatan dan karantina, penegakan hukum dan ketertiban umum, pendidikan dan budaya, serta perdagangan. Dalam aspek hukum dan ketertiban, perhatian utama diarahkan pada penyelundupan di kawasan perbatasan, penangkapan ikan secara

---

<sup>67</sup> Malawat, "Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea."

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 50

ilegal, data dari BNN Provinsi Papua, serta keberadaan kelompok yang memanfaatkan kawasan perbatasan RI-PNG sebagai basis aktivitas dan tempat berlindung.<sup>69</sup>

Pihak Indonesia menyampaikan bahwa lima wilayah perbatasan, yaitu Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Keerom, dan Jayapura, telah mencatat sejumlah kasus penyelundupan berbagai komoditas terlarang, mulai dari narkoba berupa ganja, senjata api, bahan bakar, hingga bahan peledak. Atas dasar itu, kedua negara didorong untuk meningkatkan sinergi dalam penegakan hukum dan pengoptimalan fungsi CQIS (Cukai, Karantina, Imigrasi, dan Keamanan) di sepanjang jalur perbatasan. Sementara itu, terkait aktivitas lintas batas yang dilakukan kelompok separatis asal Indonesia, disepakati bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam forum JSCSM.<sup>70</sup>

Forum BLM ke-10 diselenggarakan pada 28-29 Agustus 2013 di Medan, Indonesia, dengan melanjutkan pembahasan berbagai isu yang telah diangkat pada forum BLM ke-9 sebelumnya. Topik-topik keamanan yang didiskusikan masih serupa, mencakup kejahatan lintas negara, penangkapan ikan ilegal, serta peredaran narkoba dan zat terlarang lainnya. Namun demikian, terdapat satu agenda penting yang menjadi prioritas bersama, yakni pelaksanaan patroli gabungan di kawasan perbatasan sebagai langkah konkret untuk memperkuat keamanan wilayah.<sup>71</sup>

Pada 2015, Indonesia dan Papua Nugini kembali mengadakan forum BLM ke-12 di Jayapura. Pertemuan ini menghasilkan berbagai kesepakatan bersama

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 50

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 51

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 51

terkait pengelolaan wilayah perbatasan, yang antara lain mencakup pengembangan infrastruktur perbatasan, penataan administrasi dan tata kelola kawasan perbatasan, regulasi lalu lintas perbatasan di kedua negara, pemutakhiran data kasus yang melibatkan warga dari kedua pihak, serta penguatan kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, disamping pelaksanaan kegiatan verifikasi secara bersama.<sup>72</sup>

Terkait forum BLM ke-13 yang diadakan pada tanggal 7-8 November 2016 di Port Moresby, Papua New Guinea, pembahasan terkait permasalahan perbatasan yaitu pembangunan infrastruktur perbatasan dan pengaturan administratif perbatasan diantaranya meninjau kembali pengaturan khusus tentang pelintas batas dan pengaturan administratif lainnya. Proyek pembangunan infrastruktur Indonesia tahun 2016 di perbatasan RI-Papua Nugini diantaranya adalah: a. Pos lintas batas di Skofro (Keerom, Ninati, Kombut dan Jair (Boven Digoel). b. Jalan raya di Skofro, Keerom (RI)-Skouwtau (Papua Nugini). c. Penanda perbatasan (border marker) di Skouw.<sup>73</sup>

Pada 9–10 Desember 2024, Border Liaison Meeting (BLM) ke-18 antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG) berhasil dilaksanakan di Merauke, Papua Selatan. Forum ini menjadi ajang strategis bagi kedua negara untuk membahas berbagai aspek pengelolaan perbatasan, mencakup keamanan, perdagangan lintas batas, serta koordinasi di bidang keimigrasian dan kepabeanan. Dalam pertemuan ini, Konsul Republik Indonesia berperan sebagai *Co-Chair* Delegasi RI,

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 51

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 52

menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama bilateral dengan Papua Nugini terkait pengelolaan kawasan perbatasan. Agenda diskusi meliputi peningkatan pengawasan perbatasan, pengembangan infrastruktur lintas negara, dan upaya memperlancar arus barang serta mobilitas penduduk.

Sebagai bagian dari kegiatan BLM ke-18, pada 10 Desember 2024, delegasi melakukan kunjungan lapangan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota. Rombongan disambut oleh Kepala PLBN Sota beserta tim CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) yang bertugas di lokasi. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung operasional PLBN, termasuk fasilitas pelayanan lintas batas dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang antara Indonesia dan Papua Nugini. PLBN Sota merupakan titik penting dalam hubungan lintas batas kedua negara, berperan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kunjungan tersebut menjadi momen untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur yang ada sekaligus membahas rencana peningkatan fasilitas demi mewujudkan kerja sama lintas batas yang lebih aman, efisien, dan bermanfaat. Melalui BLM ke-18 ini, diharapkan hubungan bilateral Indonesia–Papua Nugini semakin erat, khususnya dalam pengelolaan perbatasan yang efektif, kondusif, dan saling menguntungkan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Konsulat Republik Indonesia di Vanimo Papua Nugini, “Indonesia Dan Papua Nugini Gelar Border Liaison Meeting (BLM) Ke-18 Di Merauke, Bahas Pengelolaan Perbatasan,” 2024, <https://kemlu.go.id/vanimo/berita/indonesia-dan-papua-nugini-gelar-border-liaison-meeting-blm-ke-18-di-merauke-bahas-pengelolaan-perbatasan?type=publication>.

## 2.9 Implementasi Joint Technical Sub Committee On Security Matters Along To The Common

Joint Technical Sub Committee on Security Matters (JTSC) adalah forum teknis yang dibentuk oleh Indonesia dan Papua Nugini (PNG) sebagai tindak lanjut kesepakatan kedua negara. Tujuannya untuk membahas, menyusun, dan melaksanakan kebijakan keamanan di sepanjang wilayah perbatasan, JTSC wajib melakukan pertemuan tahunan secara rutin dan jika diperlukan untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mempengaruhi keamanan nasional. JTSC berada di bawah koordinasi forum yang lebih besar, yaitu *Joint Border Committee* (JBC), dan fokus utamanya berkisar pada pengawasan wilayah, pencegahan pelanggaran batas, penegakan hukum, serta menjaga hubungan baik antarwarga yang tinggal di daerah perbatasan.<sup>75</sup>

Secara umum, JTSC punya peran penting dalam mengatur operasi keamanan bersama, memastikan patok batas tetap terjaga kondisinya, serta membangun sistem komunikasi cepat antara aparat keamanan dari kedua negara. Dalam strukturnya, JTSC melibatkan perwakilan dari TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan pihak PNG seperti PNG Defence Force.<sup>76</sup>

Hasil rapat dan rekomendasi teknis yang disusun JTSC kemudian dilaporkan kepada JBC untuk dibahas di tingkat kebijakan. Selain itu, JTSC juga menjalin koordinasi dengan forum lain seperti *Joint Border Liaison Meeting*

---

<sup>75</sup> Lampiran Perpres, "Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan," *Lampiran Perpres Republik Indonesia*, 2018.

<sup>76</sup> Marsyanti Kawab, "Dampak Kerjasama Bilateral Dan Implementasi Blm (Border Liaison Meeting) Dalam Pertahanan Dan Keamanan Indonesia-PNG."

(JBLM) dan *Joint Border Trade Committee* (JBTC) agar kebijakan keamanan selaras dengan kegiatan sosial-ekonomi di perbatasan. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rutin, pertukaran data intelijen, dan penerapan prosedur bersama dalam menangani insiden lintas batas.

Di wilayah Muara Tami, JTSC menjalankan peran strategis dalam mengawasi proses survei dan penentuan ulang posisi patok batas negara. Kegiatan ini meliputi pengukuran ulang menggunakan GPS, memeriksa kondisi fisik patok, hingga memasang tanda peringatan di titik-titik rawan pelanggaran. Tim gabungan Indonesia–PNG melakukan survei dengan peta topografi resmi dan citra satelit untuk memastikan hasilnya akurat. Demarkasi ini tidak hanya memperjelas garis batas, tetapi juga membantu mengurangi potensi konflik yang bisa muncul akibat klaim wilayah yang tumpang tindih.<sup>77</sup>

Selain survei, JTSC juga mengatur patroli gabungan di jalur perbatasan Muara Tami. Patroli ini bertujuan mencegah penyelundupan, perdagangan manusia, hingga perlintasan ilegal. Pemeliharaan patok dilakukan secara berkala, mulai dari pengecatan ulang, penggantian patok yang rusak, sampai membersihkan vegetasi di sekitarnya supaya patok tetap terlihat jelas. Semua ini membutuhkan koordinasi logistik, dukungan dana, dan keterlibatan satuan teritorial di wilayah tersebut. JTSC juga menyadari bahwa pengamanan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Karena itu, masyarakat lokal di Muara Tami dilibatkan

---

<sup>77</sup> Nandang Hermawan, “Patroli Bersama Satgas TNI Bersama Tentara PNG Di Perbatasan,” TNI AD, 2017, <https://tniad.mil.id/patroli-bersama-satgas-tni-bersama-tentara-png-di-perbatasan/>.

melalui berbagai program, seperti sosialisasi aturan lintas batas, pelatihan deteksi dini, serta mendorong warga melapor jika melihat aktivitas mencurigakan.<sup>78</sup>

Kerjasama lintas negara juga diperkuat dengan adanya *hotline* antarpos perbatasan untuk merespons insiden secara cepat. Upaya ini membantu membangun hubungan langsung antar warga kedua negara (*people-to-people contact*) dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap keamanan wilayah. Dari sisi hasil, implementasi JTSC di Muara Tami terbukti membawa dampak positif. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pelanggaran batas dan kasus penyelundupan menurun. Patroli gabungan juga mempererat hubungan kerja antar aparat keamanan, sehingga insiden kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kejelasan batas hasil demarkasi memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan wilayah di sekitar perbatasan. Namun, ada juga tantangan yang dihadapi. Mulai dari terbatasnya anggaran, medan geografis yang sulit dijangkau, hingga perbedaan prosedur operasional antara Indonesia dan PNG. Untuk mengatasinya, dibutuhkan penambahan dana pemeliharaan patok, modernisasi peralatan survei, peningkatan intensitas latihan bersama, serta memperkuat peran masyarakat sebagai mata dan telinga di lapangan (*frontline intelligence*). Selain itu, integrasi data digital lintas negara juga perlu diperluas agar penanganan insiden bisa lebih cepat dan efisien.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Syuhudi, "Dinamika Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Indonesia - Papua Nugini Di Muara Tami Jayapura." 2020

<sup>79</sup> Malawat, "Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea."

## **2.10 Implementasi Joint Technical Sub Committee on Survey, Demarcation and Mapping**

(JTSC-DM) adalah badan teknis bilateral yang dibentuk oleh dua negara yang berbatasan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian masalah teknis terkait penegasan batas wilayah. JTSC-DM berada di bawah naungan komite induk seperti Joint Border Committee (JBC) dengan fokus pada aspek teknis, seperti survei batas, penandaan ulang patok, dan pemeliharaan tanda batas dan melakukan pertemuan teknis lapang setidaknya sekali dalam satu tahun.<sup>80</sup>

Fungsi utama JTSC-DM meliputi memastikan kejelasan garis batas sesuai perjanjian, menyelesaikan perbedaan teknis di lapangan, dan memfasilitasi koordinasi lintas instansi di kedua negara, penentuan koordinat resmi batas, pemasangan dan pemeliharaan pilar/patok, serta penyusunan rekomendasi teknis untuk diputuskan pada level JBC.<sup>81</sup> Secara kelembagaan, JTSC-DM bekerja sebagai sub-unit dari forum utama seperti JBC yang membahas kebijakan strategis. JTSC-DM bertugas memberikan masukan teknis yang kemudian disahkan di forum JBC. Hubungan ini bersifat vertikal (dari JTSC ke JBC) dan horizontal (antar JTSC dari masing-masing negara). JTSC-DM juga berkoordinasi dengan Technical Working Group (TWG), badan survei nasional, dan lembaga keamanan perbatasan seperti TNI dan PNG Defence Force. Mekanisme ini memungkinkan pengambilan

---

<sup>80</sup> Perpres, “Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan.”

<sup>81</sup> Dewa Gede Sudika M, “Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (Bnpp) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini Dewa Gede Sudika Mangku.”

keputusan teknis yang cepat dan implementasi di lapangan yang konsisten dengan kebijakan nasional kedua negara.

Di wilayah Muara Tami, JTSC-DM melaksanakan survei batas menggunakan teknologi GPS geodetik, citra satelit, dan peta topografi sebagai acuan perjanjian batas 1979 Indonesia–PNG. Survei dilakukan secara gabungan oleh tim teknis kedua negara untuk memastikan posisi patok batas sesuai koordinat yang disepakati. Setelah survei, dilakukan demarkasi atau pemasangan ulang patok batas permanen dengan bahan beton bertulangan. Proses ini juga mencakup dokumentasi visual dan administratif untuk meminimalkan sengketa batas di masa depan. Selain survei, JTSC-DM berperan dalam memastikan pemeliharaan patok batas melalui kegiatan patroli gabungan. Patroli dilakukan untuk memeriksa kondisi fisik patok, mendeteksi kerusakan akibat alam atau aktivitas manusia, dan mencegah pelanggaran batas. Pemeliharaan meliputi pengecatan ulang, perbaikan struktur, hingga penggantian patok jika hilang atau rusak.<sup>82</sup>

Di Muara Tami, patroli rutin dilakukan minimal dua kali setahun, dengan penyesuaian frekuensi berdasarkan situasi keamanan dan cuaca. JTSC-DM memfasilitasi koordinasi lintas negara melalui pertemuan rutin yang melibatkan pejabat teknis, militer, dan perwakilan pemerintah daerah. Di Muara Tami, koordinasi ini diperkuat dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal, yang memiliki pengetahuan tradisional mengenai batas wilayah. Keterlibatan komunitas lokal membantu mempercepat deteksi masalah di lapangan, seperti hilangnya patok

---

<sup>82</sup> Admin bnpp, “prof zudan: bnpp identifikasi 261 patok perbatasan negara tahun 2020 - 2022,” badan nasional pengelola perbatasan republik indonesia (bnpp ri), 2023, <https://bnpp.go.id/berita/prof-zudan:-bnpp-identifikasi-261-patok-perbatasan-negara-di-2020-2022>.

atau adanya aktivitas lintas batas ilegal, sekaligus membangun rasa memiliki terhadap batas negara. Implementasi JTSC-DM di Muara Tami telah berkontribusi pada peningkatan keamanan wilayah dengan menekan angka pelanggaran batas dan aktivitas penyelundupan. Kejelasan batas melalui demarkasi mengurangi potensi sengketa, sementara patroli gabungan menciptakan efek pencegahan terhadap ancaman keamanan. Selain itu, hubungan baik antara aparat kedua negara melalui JTSC memperkuat diplomasi perbatasan dan menciptakan stabilitas di kawasan.<sup>83</sup>

Beberapa tantangan yang dihadapi JTSC-DM di Muara Tami antara lain kondisi geografis yang sulit diakses, cuaca ekstrem yang menghambat survei dan patroli, keterbatasan anggaran, serta potensi perbedaan interpretasi teknis antara kedua negara. Rekomendasi praktis meliputi: (1) peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan bersama, (2) pemanfaatan drone untuk survei cepat, (3) penguatan peran masyarakat lokal dalam pelaporan kondisi patok, dan (4) pengembangan protokol pemeliharaan berbasis teknologi informasi untuk memantau status patok secara real-time.

---

<sup>83</sup> Issue, Gede, and Mangku, "Implementaton of Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation (c-Dr) Greement Etween Indonea - Mor Ete In He Eoluton f He and Order Pute."